

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN PETANI KOPI DI DESA GUNUNGHALU KECAMATAN GUNUNGHALU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ikhmal Nasrul¹⁾, Dadan Kurnia²⁾, Waluyo Zulfikar³⁾

1,2,3) Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
 Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa dalam memberdayakan petani kopi di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya berbagai keterbatasan yang dihadapi petani kopi, seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, teknologi, modal, akses pasar, serta belum optimalnya koordinasi dan pemerataan program pemberdayaan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Gununghalu dalam memberdayakan petani kopi berdasarkan teori strategi Higgins dalam Salusu (2006), yang meliputi strategi organisasi, strategi program, dan strategi pendukung sumber daya, telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pada strategi organisasi, Pemerintah Desa melakukan identifikasi potensi dan permasalahan petani, musyawarah desa, koordinasi dengan perangkat desa, kelompok tani, koperasi, dan instansi terkait, serta pembagian tugas sesuai fungsi. Namun, koordinasi, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Pada strategi program, pemberdayaan dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan usaha tani kopi. Program telah memberikan manfaat bagi sebagian petani, tetapi pelaksanaannya belum rutin, informasi belum merata, dan belum menjangkau seluruh petani.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Petani Kopi, Desa Gununghalu.

Abstract

This study aims to analyze the strategy of the Gununghalu Village Government in empowering coffee farmers in Gununghalu Village, Gununghalu District, West Bandung Regency. This research is motivated by various limitations faced by coffee farmers, including limited knowledge and skills, technology, capital, market access, as well as suboptimal coordination and distribution of empowerment programs. This study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through literature review, observation, interviews, and documentation, while data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion

drawing. The results show that the strategy implemented by the Gununghalu Village Government in empowering coffee farmers, based on Higgins' strategy theory in Salusu (2006), which consists of organizational strategy, program strategy, and resource support strategy, has been implemented fairly well. In terms of organizational strategy, the Village Government identifies the potential and problems faced by farmers, conducts village deliberations, coordinates with village officials, farmer groups, cooperatives, and relevant agencies, and distributes responsibilities according to their respective functions. However, coordination, communication, and community participation still need to be improved. In terms of program strategy, empowerment is implemented through training, mentoring, capacity building, and the development of coffee farming enterprises.

Keywords: Village Government Strategy, Empowerment, Coffee Farmers, Gununghalu Village.

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, pertanian merupakan sektor yang sangat penting terutama di wilayah pedesaan. Sektor ini menyerap tenaga kerja besar, berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB), dan menjadi penopang ketahanan pangan serta sumber mata pencaharian masyarakat desa. Namun, dalam praktek pembangunan, tidak semua aspek pertanian berjalan optimal karena keterbatasan akses teknologi, modal, maupun kemampuan SDM petani itu sendiri (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025). Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, kondisi ini menciptakan kebutuhan akan pendekatan yang lebih dari sekedar produksi melainkan pemberdayaan masyarakat pertanian yang dapat meningkatkan kapasitas petani untuk beradaptasi menghadapi perubahan dan tantangan yang kompleks. Pemberdayaan menjadi penting karena tanpa penguatan kapasitas, inovasi, dan akses yang memadai, sektor pertanian justru rentan terhadap masalah struktural seperti rendahnya produktivitas, kemiskinan, dan marginalisasi petani.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 (Pemerintah Republik Indonesia, 2013) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa petani tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek utama yang perlu diperkuat kapasitas, kemandirian, dan daya saingnya agar mampu menghadapi dinamika pembangunan pertanian yang semakin kompleks (Mardikanto, 2009).

Dalam konteks pembangunan, strategi merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan (Adisasmita, 2013). Strategi dapat dipahami sebagai rencana terpadu yang bersifat jangka panjang dan disusun secara sistematis untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara optimal guna merespons perubahan lingkungan internal maupun eksternal (Siagian, 2012). Pada tataran implementatif, strategi sering dimaknai sebagai serangkaian langkah atau tindakan terencana yang dilakukan secara konsisten untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan petani, menuntut adanya strategi yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat sasaran agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan (Ndraha, 2011).

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya lahir sebagai respons atas kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang relatif lemah, ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta minimnya kemampuan dalam memanfaatkan peluang pembangunan. Kondisi tersebut apabila dibiarkan berpotensi menimbulkan persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakberdayaan yang berkelanjutan (Zuliyah, 2010). Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat menjadi komitmen penting pemerintah di berbagai tingkatan, termasuk pemerintah desa, yang diwujudkan melalui kebijakan, program, dan mekanisme pembangunan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel.

Di Provinsi Jawa Barat, kopi juga menjadi salah satu komoditas unggulan dengan luas lahan perkebunan mencapai lebih dari 54.605 hektare sepanjang tahun 2024. Produksi kopi di Jawa Barat pada tahun 2024 tercatat signifikan mencapai lebih dari 25.561 ton (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025). Peran Jawa Barat dalam produksi kopi bukan sekadar angka statistik, melainkan juga mencerminkan peran penting kopi dalam dinamika pembangunan ekonomi wilayah (Soekartawi, 2002). Kehadiran kopi menciptakan peluang ekonomi bagi petani, membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan kontribusi dalam jaringan pemasaran lokal maupun global. Namun demikian, dinamika produksi kopi pun tidak

selalu stabil; misalnya, terdapat pola fluktuasi produksi tahunan akibat faktor iklim, pasar, dan kualitas manajemen pertanian (Amirullah, 2015).

Dalam konteks upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi daerah/masyarakat/ wilayah sangat diperlukan sehingga kebijakan pola pembangunan dapat ditentukan baik secara sektoral maupun multisektoral. Salah satu langkah untuk inventarisasi/mengidentifikasi potensi ekonomi daerah adalah dengan mengidentifikasi potensi, produk andalan, dan produk unggulan daerah di setiap sub-sektor.

Di tingkat Kabupaten Bandung Barat, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat juga memiliki potensi perkebunan kopi, terutama dalam varietas arabika yang banyak dibudidayakan oleh petani kecil rumah tangga. Meskipun dibandingkan Kabupaten Bandung yang menjadi wilayah penghasil kopi terbesar di provinsi, potensi di Bandung Barat tetap penting sebagai bagian dari kawasan produksi kopi dan berperan dalam struktur mata pencaharian masyarakat desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2025) (Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Barat, 2025).

Khususnya Kecamatan Gununghalu, merupakan salah satu sentra produksi kopi di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi agroklimat dan sumber daya lahan yang mendukung. Desa Gununghalu sebagai bagian dari wilayah tersebut sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian kopi. Kondisi geografis yang sejuk, ketersediaan lahan yang relatif luas, serta pengalaman petani dalam mengelola kebun kopi menjadi modal penting bagi pengembangan kopi sebagai komoditas unggulan desa. Namun demikian, pengelolaan kebun kopi oleh rumah tangga petani pada umumnya masih bersifat tradisional dan menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi teknologi, permodalan, maupun akses pasar (Kasmita et al., 2021).

Permasalahan lain yang dihadapi petani kopi di Desa Gununghalu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan petani yang relatif rendah berimplikasi pada keterbatasan kemampuan manajerial, rendahnya adopsi inovasi, serta minimnya penguasaan teknologi pertanian modern. Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya produktivitas dan pendapatan petani, yang pada akhirnya memengaruhi

tingkat kesejahteraan dan ketahanan pangan rumah tangga petani (Syahyuti, 2006). Oleh karena itu, upaya pemberdayaan petani kopi harus diarahkan tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menegaskan bahwa petani perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan secara optimal, terutama dalam menghadapi berbagai risiko usaha tani seperti keterbatasan sarana produksi, ketidakpastian harga, risiko gagal panen, praktik ekonomi biaya tinggi, serta dampak perubahan iklim. Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional tersebut ke dalam program-program konkret yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal masyarakat desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2013) Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014).

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pemberdayaan petani kopi melalui strategi yang sistematis dan kontekstual sesuai kebutuhan serta kondisi lokal masyarakat. Pemberdayaan petani kopi bukan hanya soal peningkatan produksi, tetapi perlu mencakup pembinaan kapasitas SDM, kelembagaan, serta penguatan hubungan pasar agar terjadi kesinambungan antara produksi dan manfaat ekonomi yang dirasakan petani itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini fokus pada strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberdayakan petani kopi di Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan ini dipilih dengan asumsi bahwa pemerintah desa sebagai pemerintahan paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menginisiasi dan mengimplementasikan program pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya sekadar mendeskripsikan strategi yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemangku kebijakan desa dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan petani kopi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan bentuk deskriptif ini sesuai dengan kondisi di lapangan dan data yang dihasilkan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin memahami secara mendalam fenomena strategi pemerintah desa dalam memberdayakan petani kopi berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data secara alamiah melalui interaksi langsung dengan informan (Gunawan, 2013; Sugiyono, 2018). Menurut Creswell (Gunawan, 2013) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah: "pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan, atau keduanya)." Berdasarkan yang sudah dijelaskan di atas pemilihan tipe penelitian ini berdasarkan pada kecenderungan peneliti didasarkan pada kondisi lapangan data yang dihasilkan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk penelitian mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Petani Kopi Gununghalu (Kec. Gununghalu Kabupaten Bandung Barat).

PEMBAHASAN

Strategi pemerintah desa merupakan serangkaian upaya yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki desa. Dalam konteks pembangunan desa, strategi tidak hanya berorientasi pada penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, serta evaluasi terhadap berbagai program yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah desa adalah pemberdayaan masyarakat, khususnya pada sektor pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat desa. Pemberdayaan petani merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan,

keterampilan, dan kemandirian petani agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hasil pertanian, dan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Desa Gununghalu merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya komoditas kopi. Potensi tersebut menjadi salah satu aset yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat apabila dikelola secara optimal melalui strategi yang tepat dari pemerintah desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Gununghalu memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun dan melaksanakan berbagai strategi pemberdayaan petani kopi melalui penyediaan program pembinaan, pelatihan, pendampingan, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan strategi tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kelompok tani, pemerintah daerah, maupun instansi terkait sehingga tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara efektif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi menurut Higgins dalam Salusu (2006) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh tiga strategi utama, yaitu strategi organisasi, strategi program, dan strategi pendukung sumber daya. Ketiga strategi tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Desa Gununghalu menyusun, melaksanakan, serta mendukung berbagai upaya pemberdayaan petani kopi. Strategi organisasi berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menetapkan arah kebijakan, mengoordinasikan perangkat desa, serta mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan pemberdayaan petani kopi. Strategi program menitikberatkan pada penyusunan dan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan petani kopi. Sementara itu, strategi pendukung sumber daya berfokus pada pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan petani kopi.

Selain itu, keberhasilan strategi Pemerintah Desa dalam memberdayakan petani kopi tidak hanya ditentukan oleh tersusunnya

kebijakan dan terlaksananya berbagai program pemberdayaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta terjalinnya kerja sama dengan kelompok tani, pemerintah daerah, dan instansi terkait merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pemberdayaan petani kopi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara strategi organisasi, strategi program, dan strategi pendukung sumber daya agar setiap program pemberdayaan dapat dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan daya saing komoditas kopi dan kesejahteraan petani di Desa Gununghalu.

1. Strategi Organisasi

Pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gununghalu sudah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan petani kopi sebagai dasar penyusunan strategi. Proses tersebut dilakukan melalui musyawarah desa dan koordinasi dengan perangkat desa, kelompok tani, koperasi, serta instansi terkait.

Pembagian tugas di dalam pemerintahan desa juga sudah dilakukan sesuai fungsi masing-masing sehingga pelaksanaan program dapat berjalan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam koordinasi, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat. Tidak semua petani mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyusunan strategi.

2. Strategi Program

Strategi program diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- pelatihan budidaya kopi,
- pendampingan petani,
- peningkatan kualitas hasil panen,
- peningkatan kapasitas petani,
- pengembangan pemasaran produk kopi,
- serta kerja sama dengan koperasi dan instansi terkait.

Program disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi petani melalui musyawarah desa, diskusi dengan kelompok tani, serta koordinasi dengan koperasi dan penyuluh pertanian.

Dari hasil wawancara, sebagian petani mengakui bahwa program tersebut bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam budidaya dan pengelolaan kopi. Koperasi juga berperan sebagai mitra dan penghubung antara petani dengan pemerintah.

Namun, program masih menghadapi beberapa masalah, yaitu pelaksanaan yang belum rutin, informasi yang belum merata, cakupan program yang belum menjangkau seluruh petani, serta pendampingan yang belum cukup intensif.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Pada aspek ini, Pemerintah Desa Gununghalu memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mendukung pemberdayaan, terutama:

- anggaran desa,
- sumber daya manusia,
- sarana dan prasarana,
- pelatihan dan pendampingan,
- serta kerja sama dengan pemerintah daerah, koperasi, dan instansi terkait.

Anggaran desa dialokasikan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, termasuk untuk pelatihan, pendampingan, peningkatan kapasitas petani, dan penyediaan sarana pendukung. Pengelolaan anggaran dilakukan melalui musyawarah desa serta memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan terutama dalam pemerataan bantuan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pendampingan. Koperasi, misalnya, masih membutuhkan peralatan pascapanen, fasilitas pengolahan, dan sarana pemasaran untuk meningkatkan kualitas serta daya saing kopi.

KESIMPULAN

Strategi Pemerintah Desa Gununghalu dalam memberdayakan petani kopi sudah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Dari sisi organisasi,

pemerintah desa telah melakukan perencanaan, koordinasi, dan pembagian tugas, tetapi partisipasi masyarakat dan komunikasi masih perlu diperkuat. Dari sisi program, telah dilaksanakan pelatihan, pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan usaha kopi yang memberikan manfaat bagi petani, tetapi pelaksanaannya belum rutin dan belum menjangkau seluruh petani. Dari sisi pendukung sumber daya, pemerintah desa telah memanfaatkan anggaran, menyediakan sarana pendukung, dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak, namun pemerataan bantuan, sarana-prasarana, dan pendampingan masih menjadi kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif.
- Amirullah A. (2015). Pengantar Manajemen Fungsi-Proses-Pengendalian.
- Mardikanto, T. (2009).
Sistem Penyuluhan Pertanian. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2017.
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis. Mosher, A. T. (1991). Menggerakkan dan membangun pertanian. Jakarta, Indonesia: CV Yasaguna.
- Salusu, J. (2006). Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan. Organisasi Non Profit.
- Grasindo. Jakarta. Siagian, Sondang P. 2005. Manajemen Strategik, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Apsari, N. C., Gutama, A. S., Nurwati, N., Wibowo, H., Resnawaty, R., Darwis, R. S. & Humaedi, S. (2017).
Pemberdayaan petani kopi melalui penguatan kapasitas dalam pengolahan hasil kopi di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kab. Sumedang. Jurnal Penelitian & PPM, 4(2), 129-389. Dani, U., & Andayani, S. A. (2020).
- Pemberdayaan Petani Melalui Pelatihan Uji Cita Rasa Untuk Meningkatkan Kualitas Kopi. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 1-7. Jaya, B., Muhtar, E. A., & Darto, D. (2021). Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 5(2), 1061-1076.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia 2024 Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widiyaningrum, W. Y., & Latifah, N. (2026). PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI “PATANI KOPI” DI DESA
MEKARSARI KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG.
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 12(1), 251-264.